



Judul : DPR: kesannya kayak jualan orang di apsar
Tanggal : Kamis, 25 Mei 2023
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 8

Market Place Buat Guru

DPR: Kesannya Kayak Jualan Orang Di Pasar

KEMENTERIAN Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemdikbudristek) tengah menyiapkan *market place* atau pasar talenta sebagai salah satu solusi untuk mengatasi persoalan kebutuhan guru di daerah. Namun kebijakan ini dikritik Senayan lantaran *market place* ini lebih identik dengan pasar.

Anggota Komisi X DPR Himmatul Aliyah awalnya mempertanyakan Road Map atau Peta Jalan Pendidikan Nasional yang belum disampaikan Kemdikbudristek ke DPR. Padahal peta jalan ini dapat menjadi solusi dalam mengatasi persoalan kebutuhan guru terutama terkait perekrutan Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).

"Dan kita di Komisi X sudah meminta road map pendidikan atau peta jalan pendidikan yang sampai hari ini apa kabar?" kata Himmatul Aliyah dalam rapat kerja Komisi X bersama Men-

dikbudristek Nadiem Makarim beserta perwakilan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) di Gedung Parlemen, Jakarta, kemarin.

Politisi yang akrab disapa Ami ini mengatakan, peta jalan ini menjadi tanda tanya lantaran masalah pendidikan ini merata dialami semua daerah. DKI Jakarta yang notabene kota besar juga tidak luput dari persoalan pendidikan mulai dari kebutuhan guru yang mendesak untuk P3K hingga masalah infrastruktur pendidikan yang tidak seragam.

"Contoh saja mengenai zonasi. Ada kawasan di Jakarta Selatan (Jaksel) tepatnya di Ciganjur, ada satu sekolah SMA yang harusnya kalau mengacu zonasi bisa masuk, tapi tidak bisa. Padahal ini satu-satunya SMA di Ciganjur," ujarnya.

Tidak hanya itu, dia mene-

mukan di daerah Kemayoran Jaksel, justru sama sekali tidak ada SMA, yang tersedia justru hanya SMK (kejuruan). Lebih anehnya lagi, ada daerah yang memiliki Sekolah Dasar (SD) tapi SMP-nya justru tidak ada. "Jadi zonasi ini menyulitkan sekali untuk warga DKI Jakarta," ujarnya.

Ami menuturkan, sejatinya solusi dalam perekrutan guru honorer menjadi ASN P3K ini sudah ada jika peta jalan pendidikan sudah jelas. Bukan sebaliknya, malah melahirkan akrobat-akrobat kebijakan lainnya. Dia lalu menyinggung kebijakan Menteri Nadiem terkait pembentukan 'market place' untuk mengatasi kebutuhan guru di sekolah.

"Tadi ada istilah 'market place', harusnya (pakai) data base guru saja. Kalau market place kayak orang jualan di pasar. Jualan orang padahal (guru) profesi sangat mulia," ujar politisi daerah pemilihan DKI Jakarta ini. ■ KAL